

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Kegiatan pendidikan politik di DPW Partai Nasdem dilaksanakan oleh bidang pendidikan politik dan kebudayaan. Namun, tidak membedakan bentuk pendidikan politik bagi kader laki-laki dan perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik, partai dipandang kurang optimal dengan beberapa alasan berikut: (1) Ketiadaan bidang khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sumatera Barat; (2) Ketiadaan program dan anggaran khusus untuk kegiatan pendidikan politik kader perempuan; (3) Ketiadaan inisiasi program bersama antara Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah. Inisiasi program pendidikan politik bersama antara DPW dan DPD berpeluang untuk dilakukan mengingat DPW mempunyai tugas untuk itu, salah satunya seperti yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) anggaran rumah tangga partai.

2. Kesimpulan khusus

- a. Peranan DPW Partai Nasdem Sumatera Barat dalam melaksanakan meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik dibagi menjadi 2 yakni (1) DPW melakukan pendidikan politik melalui divisi pendidikan politik dan kebudayaan. Dilakukan pendidikan politik secara terencana dan insidental. DPW telah membuat program tahunan pendidikan politik sebagaimana yang dapat dilihat dalam program kerja pengurus namun dalam realisasinya belum terealisasi secara keseluruhan. Partai melakukan kegiatan pendidikan politik berbentuk sekolah legislatif di tahun 2015, temu legislatif diadakan sebanyak dua kali di tahun, kegiatan TOT saksi untuk tingkat kecamatan tahun 2017, kegiatan konsolidasi fraksi tahun

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2017, dan kegiatan TOT KSN tahun 2017. Kegiatan tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas kader; (2) DPW melakukan koordinasi dengan DPD-DPD nasdem se-sumatera dalam melakukan pendidikan politik. DPD-DPD wajib menyerahkan laporan rencana program kerja kepengurusan kepada DPW, selanjutnya DPW akan melakukan pembinaan terhadap kegiatan tersebut berupa fasilitasi waktu dan narasumber. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPW biasanya selalu berkoordinasi dengan DPD dan begitu juga seterusnya untuk menciptakan harmonisasi hubungan antar struktur kepengurusan partai. Peranan DPW dalam melakukan pendidikan politik dalam hubungannya dengan DPD adalah berkisar pada Koordinasi dengan DPD terkait dengan pelaporan rencana kerja DPD kepada DPW dan laporan pelaksanaan program kerja tersebut, serta menghadiri undangan dan permintaan DPD untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD-DPD. Bentuk fasilitasi yang diberikan adalah dukungan berupa persetujuan dan kehadiran DPW dalam kegiatan yang dilaksanakan DPD. Selain itu, ketika DPW melaksanakan pendidikan politik, DPW menginstruksikan kepada DPD, DPC dan ranting untuk mengirimkan utusannya menghadiri kegiatan.

- b. Model pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem DPW Sumatera Barat meliputi:
 - 1) Strategi pendidikan politik.

Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: *pertama*, partai bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan organisasi sosial melalui undangan sebagai narasumber dalam mengisi program-program pendidikan politik terhadap kader partai yang telah direncanakan dalam rencana kerja pengurus partai. Namun, kerjasama ini belum secara resmi dilakukan. Narasumber dihadirkan tergantung kepada materi yang diberikan pengurus dan cenderung bersifat insidental. Artinya, narasumber dihadirkan berdasarkan kebutuhan menjelang kegiatan akan dilakukan. Kegiatan pendidikan politik tersebut seperti pelatihan-pelatihan, diskusi publik dan Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seminar dengan mendatangkan narasumber. Terlihat bahwa strategi kerjasama yang dilakukan belum terpola secara terarah. *Kedua*, pemberdayaan organisasi sayap khusus perempuan yakni GARNITA MALAHAYATI. Namun karena berposisi sebagai organisasi sayap maka sifatnya berada diluar struktur internal kepengurusan partai. Artinya, hanya sebuah *supporting system* dalam pencapaian tujuan program partai. Organisasi sayap tidak bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan partai sehingga garnita belum mampu memberikan dorongan dan pengaruh dalam proses perumusan kebijakan partai yang responsif *gender*. Dari temuan penelitian terungkap bahwa garnita malahayati belum terlalu aktif dalam melakukan pendidikan politik kader perempuan. sejak pelantikan pengurus baru tahun 2017 hingga penelitian ini dilakukan belum ada kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh garnita. Dalam pelantikan pengurus sekaligus dilaksanakan seminar pendidikan politik perempuan namun kegiatan tersebut hanya dilakukan dalam hitungan jam dan bersifat satu arah (metode ceramah) dan ditutup dengan diskusi jika peserta melemparkan pertanyaan. Masih bersifat konvensional. *Ketiga*, melalui program Akademi Bela Negara (ABN), sebuah program yang digagas oleh ketua umum partai nasdem surya paloh, untuk memberikan pendidikan politik kepada kader melalui program yang terstruktur dan terpusat. Keluaran dari program ini adalah kader ABN mampu melakukan pendidikan politik kepada kader lainnya dan masyarakat di daerahnya dan siap dicalonkan untuk menjadi calon anggota legislatif.

2) materi pendidikan politik

Adapun materi pendidikan politik yang diberikan Partai Nasdem adalah sebagai berikut: *pertama*, materi seputar visi, misi, platform, jargon, ideologi dan garis perjuangan partai. *Kedua*, pengetahuan seputar kewilayahan dalam hal ini seputar Sumatera Barat. Kader merupakan putera-puteri dari wilayah dimana ia terdaftar sebagai kader nasdem sehingga pembekalan diperlukan agar memiliki kecerdasan dalam menggali dan memajukan kepentingan wilayahnya melalui wadah politik praktis, dalam hal ini kegiatan politik di partai. *Ketiga*, pembekalan mengenai Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

contoh-contoh kongkrit kegiatan-kegiatan untuk masyarakat yang dapat dilakukan kader. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai undang-undang paket politik seperti undang-undang partai politik, undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta undang-undang pemilihan umum legislatif. Peraturan perundangan-undangan tersebut merupakan titik pijak awal bagi kader untuk beraktivitas dalam politik praktis. Seorang kader yang dipersiapkan menjadi politisi harus melakukan kegiatan politik berdasarkan aturan hukum yang berlaku supaya dalam menjalankan kekuasaannya tidak berlaku sewenang-wenang. *Kelima*, yang tak kalah penting adalah materi seputar norma dan etika politik. Hal ini ditekankan untuk mengatur prilaku kader partai nasdem. *Keenam*, materi yang diberikan adalah strategi untuk kader guna merekrut masyarakat luas agar mau bergabung dan berjuang bersama partai nasdem. Pendidikan politik diberikan secara holistik. *Ketujuh*, Kebutuhan untuk berpolitik secara praktis diberikan partai dengan tujuan akhir mengantarkan kader mendapatkan kepercayaan dan diterima oleh rakyat. Keluaran dari pendidikan politik adalah kader mampu menjadi wakil rakyat.

3) Metode Pendidikan Politik.

Metode yang digunakan oleh Partai Nasdem DPW Sumatera Barat adalah metode ceramah, diskusi dan simulasi. Metode-metode yang dilakukan cenderung menjurus pada metode-metode konvensional seperti seminar, workshop dan pelatihan sehari-dua hari. Materi-materi pendidikan politik yang hendaknya disampaikan dengan metode yang menarik agar kader tidak merasa bosan dan jenuh dengan materi yang diberikan apalagi materi-materi tersebut dirasa cukup berat.

c. Partai politik mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan pendidikan politik kader perempuan serta terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Kendala-kendala partai nasdem sumatera barat dalam pelaksanaan pendidikan politik dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Kendala pertama*, yang dialami partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kader perempuan datang dari sisi internal Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perempuan yakni rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk bergabung dan terlibat aktif dalam politik praktis. *Kendala kedua*, datang dari kaum laki-laki yang juga belum terbuka terhadap perempuan dalam berpartai. Jika dilihat dari keinginan, kemauan, dan partisipasi nampaknya ada dalam diri perempuan. *Kendala ketiga*, dukungan dan izin dari keluarga. Kader perempuan cenderung sulit membagi waktu antara urusan keluarga dan kegiatan politik praktis dipartai sehingga mempengaruhi partisipasinya dalam kegiatan dan program partai. *Kendala keempat*, adalah budaya politik patriarki yang masih kental di masyarakat. Budaya masyarakat yang belum terbuka untuk perempuan berpartai sehingga berpengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam berpolitik; *Kendala kelima*, berasal dari internal partai politik. Persoalan dana pendidikan politik nyatanya masih menjadi kendala yang dirasakan oleh partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik kader, sehingga cukup menghambat gerak partai dalam merencanakan dan melaksanakan program untuk memberdayakan kader; *Kendala keenam*, Regulasi hukum di Indonesia tidak menghadirkan sanksi yang tegas untuk (1) partai yang mengabaikan fungsi pendidikan politik bagi kader, dalam hal ini kader perempuan; (2) partai yang tidak secara serius mendukung kebijakan *affirmative action* berupa pemberdayaan kader perempuan partai guna meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan di parlemen.

- 2) Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah *Upaya Pertama*, Partai melakukan pendekatan internal/personal. Partai mengedepankan cara-cara persuasif untuk menarik hati dan simpati kader perempuan guna aktif partisipatif dalam kegiatan kepartaian baik dalam merencanakan, menyukseskan maupun kemauan serta kesediaan untuk dicalonkan partai guna menjadi calon anggota legislative dari Partai Nasdem. *Upaya Kedua*, pengembangan model pendidikan politik kader perempuan secara terprogram, terstruktur dan berkesinambungan. Undang-undang partai politik tidak memberikan patokan yang jelas mengenai mekanisme pengkaderan partai sehingga tergantung kepada *political* Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

will dan *political action* masing-masing partai politik. Pengkaderan memegang peranan penting dalam pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik. Model pengkaderan bagi kader perempuan dapat dijalankan dengan proses sebagai berikut: (1) DPP Nasdem membentuk satu bidang khusus pemberdayaan perempuan dalam struktur internal partai, bukan dalam bentuk organisasi sayap sebab organisasi sayap hanya bersifat *supporting system* sehingga tidak bisa mempengaruhi kebijakan internal partai; (2) masing-masing bidang pemberdayaan perempuan DPW disertai tugas untuk melakukan pengkaderan bagi kader-kader perempuan nasdem dengan melakukan pendidikan politik per 6 wulan namun pengkaderan yang dilakukan oleh DPW hanya untuk lingkup pengurus-pengurus perempuan DPD-DPD. Sedangkan bidang pemberdayaan perempuan di DPD melakukan pembinaan terhadap bidang pemberdayaan perempuan di DPC dan begitu seterusnya hingga ke ranting. Artinya disini, DPW bidang pemberdayaan perempuan nasdem melakukan koordinasi dengan bidang-bidang pemberdayaan perempuan di DPD-DPD Nasdem guna melakukan pendidikan politik; (3) kemudian, bidang pemberdayaan perempuan di DPD melakukan pendidikan politik per 3 wulan bagi kader-kader perempuan Partai Nasdem di DPC dan begitu juga seterusnya hingga di ranting; (4) Partai Nasdem mengeluarkan kebijakan khusus melalui pengalokasian anggaran pendidikan politik baik di DPW maupun DPD untuk pelaksanaan pendidikan politik kader perempuan; (5) dibentuk kelompok-kelompok kajian di DPW, DPD, DPC dan ranting untuk memberikan pembinaan terhadap kader-kader perempuan. Jumlah anggota dalam kelompok tersebut maksimal 15 orang. Setiap satu kelompok dikoordinasi oleh satu orang mentor dengan mengacu kepada kurikulum pendidikan politik yang telah disusun secara terpusat dan terarah oleh DPP dan dijabarkan oleh DPW; (6) Para mentor-mentor pendidikan politik terhadap kader perempuan nasdem adalah pengurus-pengurus perempuan dalam struktur DPP, DPW, DPD, DPC sehingga model pengkaderan bersifat bertingkat. *Upaya Ketiga*, melalui kebijakan jaminan tanpa mahar politik. Gagasan tanpa mahar politik merupakan pengejawantahan dari Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

semangat Restorasi Indonesia yang diusung partai nasdem. *Upaya keempat*, untuk mengatasi kendala waktu adalah partai jarang melakukan rapat-rapat atau kegiatan pada malam hari. Paling lambat rapat dilangsungkan sampai pukul 4 sore. Namun tidak sampai malam. Lebih sering partai mengadakan rapat pada jam 11 siang hingga sore. Kemudian, untuk mengutus pada cara-acara yang padat kegiatannya. Partai akan menanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan mengenai kesediannya.

B. IMPLIKASI

Jika peranan partai politik tidak diperkuat melalui sejumlah strategi yang menekankan pada pemberdayaan perempuan secara politik maka berimplikasi pada rendahnya partisipasi politik perempuan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kader perempuan memerlukan pengetahuan dan keterampilan politik mengenai (1) strategi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan; (2) marketing politik guna mensosialisasikan dirinya terhadap masyarakat agar ketika mencalonkan diri dalam pemilu sehingga tidak terganjal dengan dana kampanye yang besar sebab sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sejak dini; (3) hakikat partai politik meliputi tujuan, fungsi dan ideologi partai sehingga mau bekerja sesuai dengan peran dan kedudukannya sebagai kader dalam partai politik.

Pemberdayaan perempuan oleh partai tidak begitu saja berhenti dengan pembentukan satu bidang pemberdayaan perempuan dan bidang pendidikan politik dalam struktur kepengurusan partai atau organisasi sayap bidang perempuan di luar struktur kepengurusan sebab setidaknya terdapat 2 kelemahan yang berpengaruh cukup signifikan bagi keberlangsungan kegiatan pembinaan perempuan yakni (a) organisasi sayap berada di luar struktur partai sehingga tidak mempunyai bargaining position dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan partai; (b) organisasi sayap tidak memiliki sumber dana yang tetap untuk melaksanakan pembinaan terhadap kader perempuan. organisasi sayap terpisah secara structural dengan partai walaupun berfungsi sebagai supporting sistem Partai Nasdem.

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tidak dinafikan bahwa partai telah berperan dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap kader melalui sejumlah program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan partai untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Tetapi penyamaan program antara kader laki-laki dan perempuan, ketiadaan plot dan anggaran khusus untuk kegiatan pemberdayaan politik perempuan ditambah dengan kegiatan pendidikan politik yang tidak berkesinambungan dan cenderung dilakukan secara insidental, jika hal ini dibiarkan maka partai politik sebagai pilar demokrasi dan berfungsi memberikan pencerdasan politik kepada rakyat--dalam hal ini perempuan—cenderung gagal dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Implikasi lainnya adalah jika partai politik juga tidak diberikan tekanan oleh pemerintah—regulasi pendidikan politik terhadap kader bersifat longgar dalam undang-undang partai politik-- untuk secara serius memberdayakan perempuan maka partai cenderung tidak akan tergerak untuk membangun sistem kaderisasi yang jelas untuk kader perempuan dan terjebak dengan pola perilaku politik yang pragmatis dalam artian baru bergerak ketika mendekati proses pemilihan umum untuk menjangring dukungan dan suara dari rakyat.

Bagi kader perempuan, pendidikan politik merupakan kegiatan yang penting untuk diikuti, sebab perempuan mempunyai hak untuk berpolitik praktis. Partisipasi perempuan harus lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Rendahnya partisipasi politik perempuan dalam partai politik cenderung berpengaruh pada pola dan jenis kebijakan yang tidak permisif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan. Selain itu, partai politik telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi kader melalui kebijakan jaminan tanpa mahar politik. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat bahwa dunia politik bukanlah sesuatu yang mahal dan eksklusif tetapi dapat dimasuki oleh siapapun jika memiliki kemampuan dan modal sosial yang kuat.

C. REKOMENDASI

Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumater Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagi partai politik
 - a) Diperlukan adanya pelatihan-pelatihan dan program khusus pendidikan politik bagi kader perempuan yang memberikan bekal dan pengalaman yang cocok dengan kebutuhan perempuan sebab perempuan cenderung memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan perlu penguatan untuk dirinya sendiri dan meyakinkan lingkungannya bahwa perempuan dan politik bukanlah dua hal yang bertolak belakang apalagi tabu sehingga konstruksi sosial masyarakat seputar *stereotype* terhadap politisi perempuan dapat berubah.
 - b) Diperlukan adanya regulasi internal untuk mendorong partisipasi politik kader perempuan. Contohnya, partai mewajibkan bagi pengurus partai laki-laki untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial pemberdayaan perempuan sehingga tercipta kesadaran bagi kader laki-laki untuk mendorong partisipasi perempuan. Kemudian, juga dapat melalui kewajiban bagi kader perempuan yang duduk di kepengurusan partai untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik bagi kader perempuan lainnya sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus wakil ketua bidang pendidikan politik dan kebudayaan.
 - c) Partai perlu memberikan trik dan strategi pemasaran politik khususnya terkait dengan cara berpolitik dengan biaya murah kepada kader perempuan sebab permasalahan dana merupakan salah satu faktor penghambat partisipasi politik perempuan. Perempuan yang berasal dari kalangan menengah ke bawah cenderung pasif karena tidak disokong oleh politik oleh dana politik yang mencukupi. Kemudian, juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian berpolitik perempuan sehingga tidak bergantung pada dana yang diberikan oleh keluarga atau suaminya.
 - d) Pemberdayaan kader perempuan di partai tidak selesai dengan hanya membentuk bidang khusus pembinaan perempuan atau organisasi sayap khusus perempuan tetapi diperlukan (1) sinergitas pengurus dan kader-kader laki-laki sebab pemberdayaan perempuan membutuhkan kesadaran gender dari laki-laki untuk mendukung dan mendorong partisipasi politik perempuan; (2) koordinasi masing-masing bidang

Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam struktur kepengurusan partai guna mendorong dan menyukseskan program dan kegiatan pemberdayaan politik kader perempuan sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab tunggal bidang pemberdayaan perempuan atau organisasi sayap bidang perempuan.

- e) Diperlukan kerjasama secara resmi dan berkelanjutan antara partai politik dan organisasi masyarakat yang concern perjuangan advokasi hak-hak perempuan serta organisasi masyarakat lainnya yang dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia politisi perempuan. politisi perempuan harus cerdas dan tanggap sebab kader merupakan perpanjangan tangan partai dalam melaksanakan fungsi-fungsi partai politik baik di masyarakat maupun pemerintahan.
- 2) Bagi kader perempuan

Beberapa saran untuk kader perempuan, lebih tertuju pada penguatan internal kader perempuan dalam berpolitik, diantaranya:

- a) Perempuan perlu bekerja keras dengan pembuktian nyata bahwa aktivitas politik praktis di partai tidak akan mengurangi tanggung jawab kepada keluarga. Perempuan tidak boleh mengandalkan belas kasihan dari lawan jenis dan pemerintah untuk mau menghormati dan mewujudkan hak-hak politiknya. Tetapi perempuan harus menunjukkan bahwa mereka bisa untuk berpartisipasi melalui potensi dan kerja keras yang dimiliki;
- b) Perempuan perlu motivasi yang kuat untuk berpartai karena aktivitas politik praktis rentan dipengaruhi oleh segelintir pihak-pihak yang tidak menyukai jika perempuan tampil. Kemudian, motivasi tersebut harus diwujudkan dengan keseriusan dalam mengambil ilmu melalui serangkaian kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai. jangan merasa malas untuk mengikuti kegiatan tersebut sebab kegiatan tersebut merupakan bekal dalam berpolitik, artinya mengasah keterampilan perempuan dalam berpikir, menyampaikan pendapat, bersikap dan bertindak. Jika perempuan gegabah maka ini akan menjadi peluang bagi golongan orang yang tidak menyukai aktivitas politik perempuan dengan mengatakan bahwa

Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“perempuan memang tidak cocok dan bukan kodratnya untuk berpolitik praktis dalam kepartaian”.

- c) Perempuan yang telah menjabat dalam kepengurusan partai, perlu secara *vocal* dan lantang menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam berpolitik. Jika perempuan kalah dalam jumlah di kepengurusan, maka perempuan perlu menguasai teknik *lobbying* guna mempengaruhi para elit partai untuk mendengarkan dan mengeksekusi aspirasi perempuan. Jika, dilihat dari segi jumlah pemilih, maka jumlah perempuan umumnya melebihi laki-laki sehingga ini bisa menjadi *bargaining point* dalam mewujudkan aspirasi. Syaratnya hanya satu: perempuan harus berani dan mau terus menerus belajar untuk mengasah keterampilan politik.
- d) Kader perempuan perlu membangun jaringan di masyarakat untuk mendukung kegiatan dalam berpolitik. Hal ini juga digunakan untuk mengurangi biaya-biaya politik sebab dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat maka dukungan terhadap kader perempuan akan datang tanpa dipancing dengan “*money politic*”, salah satu kelemahan perempuan dari laki-laki adalah kurangnya pendanaan dalam berpolitik, sementara jamak diketahui bahwa kegiatan politik kepartaian memerlukan dana apalagi jika ingin maju dalam pemilihan umum. Sementara rata-rata perempuan tidak mandiri secara ekonomi, artinya membutuhkan dukungan keuangan dari keluarga. Inilah salah satu kendala partisipasi perempuan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dana-dana politik, perempuan harus membangun jaringan politik sejak dini untuk menyerap dan mengagregasi aspirasi masyarakat.

3) Bagi masyarakat

Masyarakat perlu memberikan kesempatan, kepercayaan serta dorongan semangat untuk perempuan yang memutuskan terjun dalam politik praktis melalui partai politik. Tidak mudah bagi perempuan untuk berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan politisi, terlebih kesulitan tersebut harus ditambah lagi dengan stereotip dari masyarakat mengenai aktivitas politis perempuan dalam berpartai. Masyarakat perlu membuka mata bahwa partisipasi perempuan dalam politik praktis bukanlah

Hariyanti, 2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peluang untuk menyaingi apalagi mendominasi laki-laki tetapi untuk merealisasikan potensi yang dimilikinya. Jika ditafsirkan demikian, dirasa baru akan terwujud sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. perempuan sebagai bagian dari rakyat Indonesia mempunyai hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.

4) Bagi pemerintah

Pemerintah perlu membuat regulasi lebih lanjut mengenai (1) jumlah minimal pelaksanaan pendidikan politik secara formal, dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop, diskusi terbuka bagi partai politik; (2) sanksi bagi partai politik yang tidak serius dalam melaksanakan pendidikan politik; (3) arahan bagi partai politik agar membuat program-program khusus terkait dengan pemberdayaan politik perempuan guna mendorong partisipasi politik perempuan. Hal ini juga dilakukan untuk pencapaian tujuan *affirmative action*. Kebijakan kuota tidak akan berlaku efektif apabila kapabilitas perempuan tidak ditingkatkan. Pemberdayaan perempuan menjadi tanggung jawab partai sebagai salah satu pengejawantahan dari fungsi sosialisasi politik partai politik.

Hariyanti,2018

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

(Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu